



Barang Sitaan tak Diaudit , KPK akan Dianggap Terkorup

JAKARTA-RK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga hukum yang paling banyak menyita uang maupun barang berharga hasil korupsi. Ketika barang sitaan itu dikembalikan ke kas negara melalui proses audit, maka KPK bisa saja diduga melakukan tindak pidana korupsi.



Asep Warlan Yusuf

Setiap uang yang masuk kas negara harus teraudit terlebih dahulu. Jika uang langsung masuk ke kas negara tanpa proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka uang tersebut bukanlah uang negara, aneh kalau bisa lolos ke dalam kas negara.

"Kalau sudah diaudit BPK, baru bisa sah masuk kas negara sebagai hasil audit pengembalian uang negara yang kembali ke negara. Jadi memang tidak bisa diklaim begitu saja tanpa audit. Tanpa audit, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Makanya harus dipastikan teraudit," kata Asep Warlan Yusuf, pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, menyikapi laporan BPK ke DPR tentang sitaan KPK

■ Halaman 7



Barang Sitaandari halaman 1

yang belum diaudit, Minggu (29/9).

Selain diaudit, aset sitaan KPK juga harus jelas tempat penyimpanannya, digunakan untuk apa dan bagaimana proses menyimpannya. "Kalau aset sitaan terbukti disimpan di rekening-rekening pribadi, maka aset sitaan rawan digelapkan," tegasnya.

Jika ini terjadi, menurutnya Asep, KPK justru menjadi lembaga paling korup, karena mengorupsi aset sitaan yang justru harus diselamatkannya.

"Sekarang terkesan tidak ada lembaga yang berani mengawasi KPK. Dengan fakta ini sangat mungkin harta sitaan hasil korupsi dikorupsi lagi," tegas Asep.

Karena itu, DPR harus menyikapinya. Kalau BPK tidak berani mengaudit, sementara kejaksaan dan kepolisian juga tidak berani mengusik KPK, maka DPR harus keras menyuarakannya. DPR tidak perlu takut melawan opini publik yang mengatakan DPR ingin melemahkan KPK.

"Kita sudah lihat saat polisi mau menarik anggotanya dari KPK, KPK melawan dan masyarakat justru menuduh

polisi mau menghancurkan KPK. Kejaksaan pun demikian, maka satu-satunya harapan hanya DPR, tidak perlu takut kalau dituduh mau membubarkan KPK. Pengawasan KPK tidak bisa diserahkan kepada KPK sendiri," ungkapnya.

Dicurigai Selewengan Barang Sitaan

Anggota Komisi III DPR, Fahri Hamzah mengatakan, pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal penyelamatan keuangan negara dalam kasus korupsi yang ditanganinya, belum terklarifikasi berdasarkan aturan hukum berlaku. Pernyataan itu menurut Fahri, hanya klaim sepihak KPK yang belum pernah diaudit oleh BPK.

"Menurut laporan BPK kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, sitaan KPK belum pernah diaudit BPK, karena KPK belum pernah melaporkan-nya," kata Fahri Hamzah, saat dihubungi wartawan, Minggu (30/9).

Fahri lantas mempertanyakan pijakan KPK yang mengumumkan besaran keuangan negara yang berhasil diselatkan. Menurutnya, untuk menentukan nilai sitaan harus

diaudit terlebih dahulu, baru kemudian disetorkan ke kas negara.

Dengan demikian kata dia, proses pengembalian barang-barang sitaan tersebut juga rawan diselewengkan. "Sekarang ini kan dirampas dulu tanpa proses audit. Dengan proses seperti ini maka bisa saja yang dirampas 100, tapi yang disetor hanya 5. Sebenarnya ini tidak boleh dilakukan," ujarnya.

Dikatakannya, BPK sampai saat ini juga tidak tahu dimana KPK menyimpan barang-barang sitaan. Ini bisa terjadi karena KPK tidak ada yang mengawasi.

Karena itu, tidak heran permintaan DPR kepada BPK terkait audit terhadap KPK hingga kini belum pernah masuk ke DPR. Celakanya, menurut Fahri, BPK terkesan enggan mengaudit KPK.

"Kita sudah minta sejak lama kepada BPK, tapi sampai saat ini laporan terkait audit kinerja BPK di KPK tidak juga masuk sampai saat ini, ada kesan mereka saling sandera juga," ungkap politisi PKS tersebut.

Re-editing: Hamka Saptono